

MODAL SOSIAL SUBAK SEBAGAI ENERGI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERKOTAAN: Kasus Subak Kerdung Kota Denpasar

RATNA KOMALA DEWI

Dosen Pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Univ. Udayana

ABSTRAKS

Dalam masyarakat Indonesia, cukup banyak nilai-nilai sosial seperti budaya gotong royong, kelembagaan bagi hasil, berbagai bentuk kearifan lokal, yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari budaya ekonomi modern. Di lain pihak, dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Indonesia selama ini terlalu menekankan pent-ingnya peranan modal alam dan modal ekonomi modern, tetapi sering mengabaikan pentingnya modal sosial. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki modal sosial yang sudah dikenal sejak lama di tingkat nasional maupun internasional, yaitu subak. Di perkotaan sering terjadi konflik dalam memperoleh air pada musim kemarau dan membuang kelebihan air pada musim hujan sebagai akibat alih fungsi lahan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaan modal sosial subak sebagai energi sosial dalam pembangunan pertanian di perkotaan, khususnya di subak.

Proses harmoni dan kebersamaan sebagai implementasi falsafah utama Subak Kerdung, yaitu *Tri Hita Karana* telah mewujudkan Subak Kerdung menjadi modal sosial yang kuat. Modal sosial subak ini berupa *trust* yang tinggi dalam bentuk pengambilan keputusan yang adil; jaringan sosial yang luas; partisipasi yang tinggi dalam bentuk gotong royong untuk menjaga kelestarian alam; resiprositas yang kuat dalam mencukupi kebutuhan air irigasi; norma dalam *awig-awig* subak sebagai pedoman berperilaku; serta nilai-nilai seperti rasa bersyukur, rasa malu, kejujuran, sabar, disiplin, dan tanggungjawab yang tinggi. Elemen-elemen ini jika dihimpun dan didaya-gunakan akan menghasilkan energi sosial yang bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan pembangunan pertanian. Saran yang ditawarkan dalam tulisan ini adalah subak difungsikan sebagai “jembatan” untuk kepentingan anggota subak dan subak diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan pertanian.

Kata kunci: modal sosial, subak, energi sosial, pembangunan pertanian, perkotaan

ABSTRACT

In Indonesian society, quite a lot of social values such as cultural mutual cooperation, institutional sharing, various forms of local wisdom, which can be developed as part of the culture of the modern economy. On the other hand, in the implementation of agricultural development in Indonesia has too emphasized the importance of the role of natural capital and the capital of a modern economy, but often overlook the importance of social capital. Bali is one area that has a social capital that has been known for a long time in national and international level, namely subak. In urban areas of conflict often occur in obtaining water in the dry season and get rid of excess water in rainy season as a result of land-uses. This paper aims to describe subak performance as a social energy in agriculture development in urban, particularly in subak.

The process of implementation of harmony and togetherness as main philosophy Subak Kerdung, which is *Tri Hita Karana* had fulfilled Subak Kerdung became a strong social capital. Subak this form of social capital is high trust in the form of a fair decision-making; extensive social networks; high participation in the form of mutual cooperation for the preservation of nature; strong reciprocity in sufficient irrigation water; norm in *awig-awig* subak as a guideline to behave ; as well as values such as gratitude, shame, honesty, patience, discipline, and responsibility are high. These elements, if collected and utilized to generate social energy that can be utilized in realizing agricultural development. Advice offered in this paper is subak should be functioned as a “bridge” for the benefit of subak members and subak positioned as a subject in agricultural development.

Key words: social capital, subak, social energy, agricultural development, urban.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di ban-yak negara termasuk di Indonesia selama ini terlalu menekankan pentingnya peranan modal alam (*NaturalCapital*) dan modal ekonomi (*Economic Capital*) modern seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan dan norma-norma lokal. Hal ini terjadi karena adanya anggapan para per-encana pembangunan bahwa tradisi suatu komunitas atau etnis lebih dianggap sebagai penghambat program pembangunan dari pada sebagai potensi untuk menunjang pembangunan. Akibatnya, tidak jarang program pembangunan pertanian yang berlangsung di tengah tengah masyarakat terasa asing bagi masyarakat itu sendiri. Pada era reformasi dan setelah terbitnya UU Otonomi Daerah ini, penilaian negatif tersebut mulai berkurang.

Dalam masyarakat Indonesia, cukup banyak nilai-nilai sosial seperti budaya gotong royong, kelembagaan bagi hasil, berbagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki semua etnis, yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari budaya ekonomi modern. Modal so-sial telah teruji oleh sejarah sebagai mekanisme penting dalam upaya mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat (Mawardi, 2007).

Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki modal sosial yang sudah dikenal sejak lama di tingkat nasional maupun internasional, yaitu modal sosial subak. Dalam modal sosial subak terdapat rasa sal-ing percaya, jaringan sosial, nilai maupun norma sosial. Subak ada yang terletak di pedesaan maupun di perkotaan. Semakin tingginya alih fungsi lahan khususnya di perkotaan mengakibatkan ruang aktivitas subak semakin sempit dan sebagian saluran irigasi terputus oleh bangunan. Akibatnya, konflik di antara anggota subak tidak dapat dielakkan, petani kesulitan memperoleh air untuk usahatani khususnya pada musim kemarau, dan kesulitan membuang kelebihan air. Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana keragaan modal so-sial subak sebagai energi sosial dalam pembangunan pertanian di perkotaan.

1.2 Tujuan penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan keragaan modal sosial subak sebagai energi sosial dalam pembangunan pertanian di perkotaan, khususnya di subak.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Modal Sosial

Konsep modal sosial kembali marak dibicarakan setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial yang telah dilaksanakan di Kopenhagen 12 Maret 1995. Modal sosial tiba-tiba tampil menjadi kata kunci menanggapi tiga agenda pokok konferensi: mengurangi kemiskinan, menciptakan angkatan kerja yang produktif, dan meningkatkan integrasi social (Mariana, 2006). Pengertian modal sosial yang berkembang selama ini lebih banyak didasarkan pada pandangan tiga orang ilmuwan sosial, yaitu Pierre Bourdieu, James Coleman, dan Robert Putnam. modal sosial sebagai "agregat dari sumberdaya potensial dan aktual yang berhubungan dengan kepemilikan dan jaringan yang berlangsung lama karena adanya hubungan yang terinstitusionalisasi dan saling mengakui". Bourdieu melihat individu mendapat keuntungan karena partisipasinya dalam asosiasi, bukan hanya karena adanya akses terhadap sumberdaya tetapi menyangkut jumlah dan kualitas sumberdaya itu.

Coleman (1988) mendefinisikan modal sosial menunjuk kepada tiga unsur penting yang menentukan dalam penguatan *civil society*, yakni adanya jaringan hubungan sosial (*networks of social relations*), rasa saling percaya (*reciprocal trust*), dan kemauan untuk saling membalas kebaikan (*norm of reciprocity*). Kemudian, Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai "gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Menurut Putnam, modal sosial hanya dapat dibangun ketika tiap individu belajar dan mau mempercayai individu lain, sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Cox (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama.

Modal sosial merupakan konsep yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara integrasi sosial. Meskipun konsep modal sosial bersifat multidimensi, secara operasional modal sosial menunjuk pada norma-norma dan

jaringan-jaringan yang memungkinkan terjadinya aksi kolektif. Menurut Kartasasmita (1997), modal sosial adalah sumber kekuatan yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai makhluk sosial, setiap masyarakat seharusnya memiliki modal sosial, tentu dengan derajat modal sosial yang berbeda antara satu masyarakat (komunitas) dengan satu masyarakat yang lainnya. Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, di mana hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerjasama, pertukaran sosial, saling percaya, termasuk norma dan nilai yang mendasari hubungan sosial tersebut. Pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama (partisipasi aktif).

2.2 Unsur-Unsur Modal Sosial

Kegiatan bersama (kolektif) antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen/unsur-unsur modal sosial. Unsur-unsur modal sosial dapat dikelompokkan ke dalam syarat keharusan dan syarat kecukupan dari terbentuk dan terbangunnya

2.2.1 Syarat Keharusan Modal Sosial

Unsur modal sosial yang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) adalah kepercayaan (*trust*). Masyarakat yang memiliki kapabilitas *trust* yang tinggi (*high trust*) atau memiliki *spectrum of trust* yang lebar (panjang) akan memiliki potensi modal sosial yang kuat. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki kapabilitas *trust* yang rendah (*low trust*) atau memiliki *spectrum of trust* yang sempit (pendek) maka akan memiliki potensi modal sosial yang lemah. *Trust* ini dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain (1) seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberanian untuk berpendapat dengan pemimpinnya; dan (2) seberapa banyak warganegara yang menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya.

Menurut Putnam (1993), *trust* memiliki kekuatan mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemakmuran sosial dan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh suatu komunitas atau bangsa. Kekuatan dan kelemahan *trust* di dalam suatu komunitas ditentukan oleh rentang rasa mempercayai (*the radius of trust*) di antara anggota komunitas tersebut (Coleman, 1999). Pada komunitas yang berorientasi *inward looking* cenderung memiliki *the radius of trust* yang pendek (sempit), sedangkan pada komunitas yang berorientasi *outward looking* dan memiliki kohesitas serta solidaritas sosial yang tinggi cenderung memiliki *the radius of trust* yang panjang (luas). Masyarakat yang memiliki *radius of trust* yang panjang (luas) terbuka terhadap harapan kemajuan dan semangat berkompetisi secara sehat yang dilandasi nilai universal, antara lain *altruism* (semangat kemanusiaan yang jujur, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan orang lain); *social reciprocity* (semangat saling membantu), *dignity* (harga diri), serta *homo ous homo homini* (semangat untuk tidak menzalimi orang lain), *trustworthiness* (semangat yang amanah). Tanpa adanya *trust* maka yang terbentuk adalah *low trust society*, di mana masyarakat tidak mempercayai pemerintah sebagai figur otoritas dan akibatnya pemerintah kehilangan legitimasinya dalam mewujudkan tertib sosial dalam masyarakat.

2.2.2 Syarat Kecukupan Modal Sosial

Unsur-unsur yang dapat dipandang sebagai syarat kecukupan (*sufficiency condition*) dari terbentuk atau terbangunnya kekuatan modal sosial di suatu masyarakat adalah (a) partisipasi dalam jaringan sosial (*participation and social network*), (b) saling tukar kebaikan (*reciprocity*), (c) norma sosial (*social norm*), (d) nilai-nilai sosial, dan (e) tindakan yang proaktif.

a) Partisipasi dalam Jaringan Sosial (*Participation and Social Network*)

Menurut Hasbullah (2006), kemampuan anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis, akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat atau tidaknya modal sosial yang terbentuk. Kemampuan tersebut adalah kemampuan untuk ikut berpartisipasi guna membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan dilakukan atas prinsip kesukarelaan (*voluntary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Partisipasi dan jaringan hubungan sosial yang terbentuk biasanya diwarnai oleh tipologi yang khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Partisipasi dan jaringan hubungan sosial yang terbentuk pada masyarakat tradisional biasanya didasarkan pada kesamaan garis keturunan (*lineage*), pengalaman sosial turun temurun (*repeated social experiences*), kesamaan kepercayaan pada dimensi religius (*religious beliefs*). Sebaliknya, pada

kelompok masyarakat yang dibangun atas dasar kesamaan orientasi dan tujuan dengan ciri pengelolaan organisasi yang lebih modern, akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang luas. Pada tipologi masyarakat modern akan lebih banyak menghadirkan dampak positif bagi kemajuan kelompok masyarakat tersebut maupun kontribusinya dalam pembangunan masyarakat secara luas.

b) Reciprocity

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan (*reciprocity*) antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri di dalam masyarakat (Hasbullah, 2006). Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara seketika seperti halnya proses jual-beli, akan tetapi merupakan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism*.

Pada masyarakat atau kelompok sosial yang terbentuk di mana di dalamnya memiliki bobot resiprositas kuat, akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial tinggi (kuat). Hal ini juga akan terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu, dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian iniberbagai problem sosial akan dapat diminimalkan dan masyarakat akan lebih mudah membangun diri, kelompok, serta lingkungan sosial dan fisik secara mengagumkan. Keadaan sebaliknya, biasanya akan terjadi pada tipologi kelompok masyarakat tradisional.

Akan tetapi pada masyarakat yang memiliki tingkat resiprositas yang kuat, belum tentu dapat memiliki dampak positif yang cukup besar bagi kelompok masyarakat lainnya. Hal ini akan tergantung pada sifat-sifat dan orientasi nilai yang berkembang di dalam masyarakat tersebut. Pada tipologi masyarakat yang relatif tertutup, resiprositas yang kuat akan bernilai positif untuk lingkungan sosialsetempat (lingkungan sosialnya sendiri), akan tetapi belum tentu menghasilkan nilai positif bagi kelompok masyarakat yang lain. Sebaliknya pada tipologi masyarakat yang relatif terbuka, resiprositas yang kuat akan memberikan dampak positif yang lebih luas, baik untuk lingkungan sosial setempat dan untuk kelompok masyarakat yang lain.

c) Norma Sosial (Social Norm)

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Menurut Hasbullah (2006), norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas. Norma-norma ini terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Aturan-aturan tersebut biasanya tidak tertulis, akan tetapi dipahami oleh setiap anggota masyarakatnya dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial. Aturan-aturan kolektif itu misalnya menghormati pendapat orang lain, tidak mencurangi orang lain, kebersamaan, dan lainnya. Apabila di dalam suatu komunitas masyarakat, asosiasi, group, atau kelompok norma-norma tersebut tumbuh, dipertahankan, dan kuat maka akan memperkuat masyarakat itu sendiri. Inilah alasan mengapa norma-norma sosial merupakan salah satu unsur modal sosial yang akan merangsang keberlangsungan kohesifitas sosial yang hidup dan kuat.

Hasbullah (2006) juga berpendapat bahwa norma-norma sosial ini senantiasa memiliki implikasi yang ambivalen. Sebagai contoh, norma *formality* yang dianut kuat di dalam masyarakat Melayu pada umumnya, memang dapat menciptakan suasana khidmat dalam hubungan sosial antar anggota kelompok atau sesama anggota masyarakat, akan tetapi di sisi lain cenderung tidak merangsang munculnya ide-ide baru.

d) Nilai-Nilai Sosial

Nilai sosial adalah suatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat (Hasbullah, 2006). Misalnya nilai 'harmoni', 'prestasi', 'kerja keras', 'kompetisi' dan lainnya adalah merupakan contoh-contoh nilai yang sangat umum dikenal di dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial senantiasa juga memiliki kandungan konsekuensi yang ambivalen. Nilai harmoni misalnya, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan sosial yang tercipta, akan tetapi di sisi lain dipercaya pula senantiasa menghasilkan suatu kenyataan yang menghalangi kompetisi dan produktivitas.

Pada kelompok masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai harmoni biasanya akan senantiasa ditandai oleh suatu suasana yang rukun, akan tetapi terutama dalam kaitannya dengan diskusi pemecahan masalah misalnya akan tidak produktif. Modal sosial yang kuat juga ditentukan oleh nilai sosial yang tercipta dari suatu kelompok masyarakat demikian ini. Apabila suatu kelompok masyarakat memberikan bobot yang tinggi pada nilai-nilai: kompetisi, pencapaian, keter-us-terangan,

dan kejujuran maka kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari keterusterangan, kompetisi, dan pencapaian.

2.3 Energi Sosial

Energi sosial itu meliputi seluruh elemen sosial, potensi kreatif masyarakat, serta prakarsa, dan gagasan-gagasan yang berkembang di masyarakat, yang semuanya itu bisa digalang untuk dijadikan kekuatan pembangunan. Energi sosial bisa berasal dari kegiatan individu, dalam masyarakat, keluarga, kelompok, himpunan, atau golongan masyarakat (etnis dan agama)

Seperti ditunjukkan oleh Uphoff (1986), dalam memahami konsep energi sosial ini ada perbedaan secara kontras antara pemikiran yang bersifat *positive-sum* atau "*both-and*" di satu pihak, dan pemikiran yang bersifat *zero-sum* atau "*either-or*" di pihak lain. Jadi, sesungguhnya energi sosial itu dapat merupakan kekuatan konstruktif atau destruktif, dan karenanya amat tergantung pada sistem sosial yang mengaturnya. Dalam sistem sosial yang berdaya inovasi tinggi, energi sosial bisa diolah dengan baik sehingga dapat menjadi kekuatan dinamis yang mampu menggerakkan pembangunan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa berakibat merugikan, seperti halnya api bisa bermanfaat, tetapi juga bisa mendatangkan malapetaka.

2.4 Pembangunan Pertanian

Pembangunan dipandang sebagai usaha terencana untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan dengan menggunakan cara-cara dan teknologi tertentu yang dipilih. Dalam pembangunan, peranan sektor pertanian sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut (Margono, 2000).

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan *skill* untuk memperbesar turut campur-tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuhan dan hewan.

Pada dasarnya pembangunan pertanian Indonesia sudah mengikuti teori pembangunan pertanian modern (Mosher, 1991) dalam bukunya "*Getting Agricultura Moving*" yang menyebutkan perlunya 10 faktor untuk memodernisasi pertanian, yakni lima faktor esensial yang menjadi syarat mutlak dan selalu hadir agar petani mengadopsi inovasi, antara lain; teknologi baru, adanya pasar, adanya suplai sarana produksi pertanian, adanya system transportasi bagi saprotan dan hasil pertanian, serta adanya rangsangan berproduksi. Supaya pembangunan pertanian itu terlaksana, pengetahuan dan keterampilan para petani haruslah terus meningkat dan berubah. Oleh karena para petani terus-menerus menerima metoda baru, cara berpikir mereka pun berubah. Mereka mengembangkan suatu sikap baru yang berbeda terhadap pertanian, terhadap alam sekitar mereka dan terhadap diri mereka sendiri.

2.5 Konsep Subak

Beberapa definisi subak yang pernah diberikan oleh peneliti dan pemerhati subak adalah sebagai berikut.

1. Subak adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio-agraris religious yang secara historis didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari suatu sumber air di dalam suatu daerah (Peraturan Daerah No.02/PD/DPRD/1972).
2. Subak sebagai suatu sistem irigasi, selain merupakan sistem fisik juga merupakan sistem sosial. Sistem fisik diartikan sebagai lingkungan fisik yang berkaitan erat dengan irigasi seperti sumber-sumber air beserta fasilitas irigasi berupa empelan, bendung atau dam, saluran-saluran air, bangunan bagi, ..., dan sebagainya, sedangkan sistem sosial adalah organisasi sosial yang mengelola sistem fisik tersebut (Sutawan, 2008).
3. Subak sebagai organisasi petani pemakai air yang sawah-sawah para anggotanya memperoleh air dari sumber yang sama dan mempunyai satu atau lebih pura Bedugul serta mempunyai otonomi penuh baik ke dalam (mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri), maupun keluar dalam arti kata bebas mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar secara mandiri (Sutawan, dkk., 2008).

Fungsi dan tugas-tugas yang dilakukan oleh subak dapat dibagi atas fungsi/tugas internal dan eksternal. Secara eksternal, subak mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam

pembangunan pertanian dan pedesaan. Secara internal, subak mempunyai peranan, fungsi, dan tugas yang sangat penting dan mutlak bagi kehidupan organisasi subak sendiri, maupun kehidupan anggota-anggotanya, dalam hubungannya dengan pertanian. Sutawan dkk. dalam Pitana (1993), menemukan bahwa ada lima tugas utama yang harus dilaksanakan oleh subak, yaitu (1) Pencarian dan distribusi air irigasi; (2) Operasi dan pemeliharaan fasilitas; (3) Mobilisasi sumberdaya; (4) Penanganan persengketaan; dan (5) Kegiatan upacara/ritual. Subak sebagai sistem irigasi tradisional memiliki beberapa ciri penting antara lain: (1) Mempunyai batas-batas yang jelas dan pasti menurut wilayah hidrologis bukan wilayah administrasi desa; (2) Lembaga irigasi yang bersifat formal; (3) Ritual keagamaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manajemen irigasi subak; (4) Subak mempunyai hak otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri; (5) Subak memiliki satu atau lebih sumber air bersama dan satu atau lebih Pura Bedugul bersama; (6) Tiap anggota subak memiliki "one inlet" dan "one outlet"-nya masing-masing; (7) Aktivitas-aktivitas subak dilandasi semangat gotong royong atau tolong menolong, saling mempercayai atau menghargai berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan; (8) Pengambilan keputusan dalam pengelolaansistem irigasi subak berlandaskan prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keberadaan sistem subak di Bali yang bisa bertahan hingga saat ini, tampaknya karena sistem subak memiliki sifat-sifat sebagai suatu sistem teknologi sepadan. Menurut Mangunwijaya dalam Pitana dan Setiawan (2005), teknologi sepadan memiliki sifat-sifat sebagai berikut. (1) kegiatannya berdasarkan pada usaha swadaya; (2) bersifat desentralisasi; (3) kegiatannya berdasar pada kerjasama dan bukan pada persaingan; dan (4) merupakan teknologi yang sadar pada tanggung-jawab sosial dan ekologis.

III METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara beberapa ketua kelompok atau *pangliman munduk*, sedangkan data sekunder diperoleh berdasarkan hasil studi pustaka dari buku referensi, hasil-hasil penelitian dalam jurnal ilmiah, skripsi, dan internet. Selanjutnya, data sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penulis mendeskripsikan dan memberikan penafsiran-penafsiran dengan interpretasi rasional yang memadai terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang digunakan.

IV PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Fisik dan Geografi Subak Kerdung

Subak Kerdung terletak di Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, ketinggian 5 sampai 20 meter di atas permukaan air laut, 7° LU dan 8° LS. Subak Kerdung terletak di Pesedahan Yeh Mertegangga dengan batas-batas wilayah sebelah Utara adalah Subak Sanglah, sebelah Timur adalah Subak Sesetan, sebelah Selatan adalah rawa-rawa di Laut Benoa, dan sebelah Barat adalah Subak Kerdung.

Jenis tanahnya termasuk tanah aluvial yang dilalui oleh Sungai Badung dengan membawa banyak humus sehingga tanah menjadi subur dengan pH tanah berkisar antara 6,5 sampai 7. Total luas lahan tanam menurut munduk di Subak Kerdung Kelurahan Pedungan adalah 246,43 Ha, terbagi atas sembilan munduk (kelompok), yaitu Munduk Babakan (27,73 Ha), Munduk Abasan (37,91 Ha), Munduk Sirah (18,36 Ha), Munduk Pantus (10,32 Ha), Munduk Pitik (16,53 Ha), Munduk Timbul (36,98 Ha), Munduk Buyuk (22,41 Ha), Munduk Nyalin (32,42 Ha), dan Munduk Kerdung (43,83 Ha) (Sarimarito, 2007).

Pola tanam pada Subak Kerdung diatur oleh pekaseh, semula secara bergiliran yaitu sebagian padi-padi-palawija dan yang lainnya padi-padi-padi, kemudian dalam dua tahun terakhir pola tanam yang diterapkan adalah padi-padi-padi. Subak Kerdung saat ini dipimpin oleh Pekaseh I Wayan Tame. Jumlah anggota Subak Kerdung sebanyak 383 orang yang terdistribusi dalam sembilan munduk, yaitu Munduk Babakan (47 orang), Munduk Abasan (40 orang), Munduk Sirah (46 orang), Munduk Pantus (42 orang), Munduk Pitik (70 orang), Munduk Timbul (20 orang), Munduk Buyuk (30 orang), Munduk Nyalin (31 orang), dan Munduk Kerdung (57 orang) (Sarimarito, 2007).

4.2 Modal Sosial Subak Kerdung

Modal sosial subak memiliki falsafah utama *Tri Hita Karana* (THK). *Tri Hita Karana* artinya tiga unsur yang menyebabkan kesejahteraan atau kebahagiaan, yang berkaitan erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan penerapannya melalui proses harmoni dan kebersamaan. Penerapan *Tri Hita Karana* mencakup (1) unsur *parhyangan* (keserasian dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa), (2) unsur *pawongan* (keserasian dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia), (3) unsur *palemahan* (keserasian dan keharmonisan hubungan

antara manusia dengan alam sekitarnya). Hal ini berarti, untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan material dan spiritual, manusia perlu menciptakan dan membina keserasian dan keharmonisan hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa, manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan alamnya (Sutawan, dkk, 1983 dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2002, Windia dan Dewi (2007).

Selain berfalsafah *Tri Hita Karana*, subak memiliki *awig-awig* yang merupakan pedoman berperilaku anggota dan pengurus subak. *Awig-awig* memuat aturan yang harus dijalankan dan sanksi terhadap pelanggaran aturan. Berdasarkan beberapa definisi modal sosial maka keragaan modal sosial Subak Kerdung dalam tulisan ini dideskripsikan melalui elemen-elemen modal sosialnya, yaitu *trust*, partisipasi dalam jaringan sosial, norma dan nilai-nilai sosial.

4.2.1 Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan so-sial (*social trust*). Kepercayaan sosial merupakan hubungan sosial yang dibentuk atas dasar rasa percaya atau saling mempercayai. *Trust* atau rasa saling mempercayai antar anggota subak maupun antara anggota dengan pengurus subak ini dicerminkan dalam pengambilan keputusan. Anggota subak mempercayai bahwa pengurus mengambil keputusan secara adil dan pengurus mempercayai anggota melaksanakan keputusan secara jujur. Implementasi dari *trust* berkaitan erat dengan norma dan nilai yang diusung oleh subak, yaitu *Tri Hita Karana*. Sebagai contoh:

- a. Dalam pembagian air irigasi, anggota sepenuhnya mempercayai pengurus dapat membagi air irigasi secara adil. Pengurus juga mempercayai anggota tidak mengambil air irigasi yang bukan haknya sesuai aturan yang ada.
- b. Masa kepemimpinan *pekaseh* lebih relatif lama, yaitu lebih dari satu periode. Masa kepemimpinan *pekaseh* yang saat ini sedang bertugas sudah mencapai sembilan tahun. *Pekaseh-pekaseh* sebelumnya memimpin Subak Kerdung berkisar antara 10-25 tahun. Hal ini menunjukkan bentuk kepercayaan anggota kepada pemimpinnya.
- c. Selain interaksi asosiatif (kerjasama), terdapat pula interaksi dissosiatif (konflik) di Subak Kerdung. Penyelesaian konflik yang terdapat di subak ini dipercayakan kepada *pekaseh* dan pengurus subak. Konflik internal ditangani oleh *pekaseh* atau *pekaseh* bersama pengurus secara musyawarah-mufakat berdasarkan *awig-awig* subak. Pimpinan subak tidak memberikan sanksi melainkan menyadarkan anggota yang melanggar agar tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar *awig-awig* subak yang telah disepakati bersama. Konflik dengan pihak eksternal dilakukan dengan interaksi vertikal atau penyelesaiannya dimohonkan kepada pihak penguasa di luar subak sebagai mediator seperti kepala desa, pengamat pengairan, PPL, dan sebagainya. Konflik di Subak Kerdung berupa konflik antar individu dalam kelompok, antara individu dengan kelompoknya (*munduknya*), konflik antara individu yang kelompoknya berbeda, dan konflik antara Subak Kerdung dengan pihak luar (bukan anggota Subak Kerdung). Konflik yang pernah terjadi antara lain anggota tidak hadir dalam rapat atau gotong royong, masalah pembagian air irigasi, ternak sapi yang merusak tanaman, tersumbatnya pembuangan kelebihan air oleh bangunan yang semakin banyak terdapat di wilayah Subak Kerdung, kesulitan memperoleh beberapa sarana produksi pertanian, serta pencemaran sungai dan air irigasi seperti limbah air sablon dan limbah rumah tangga berupa sampah-sampah dan plastik. Konflik pembagian air biasanya terjadi pada saat musim kemarau. Di antara konflik yang pernah terjadi tidak berakibat serius, sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi sosial di subak ini baik.
- d. Anggota dan pengurus subak respon terhadap inovasi yang terbukti inovasinya secara teknis dapat dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, dan secara sosial budaya tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Hal ini menunjukkan kepercayaan anggota dan pengurus subak kepada inovator. Respon terhadap inovasi dibuktikan oleh Subak Kerdung telah lima kali mendapat penghargaan lomba subak, yaitu (1) Penghargaan Subak Kerdung sebagai pemenang I dalam rangka evaluasi intensifikasi kedelai tingkat Kota Denpasar tahun 2002; (2) Penghargaan Subak Kerdung sebagai kelompok tani/subak berprestasi I atas keikutsertaannya dalam evaluasi penerapan teknologi usaha tani kedelai tingkat Provinsi Bali tahun 2003; (3) Penghargaan Subak Kerdung sebagai pemenang II dalam rangka evaluasi intensifikasi agribisnis padi tingkat Kota Denpasar tahun 2003; (4) Penghargaan Subak Kerdung sebagai kelompok tani/subak berprestasi I atas keikutsertaannya dalam evaluasi penerapan teknologi usaha tani padi tingkat Propinsi Bali tahun 2004, dan (5) Penghargaan kelompok tani Subak Kerdung Kota Denpasar-Bali atas prakarsa dan prestasinya dalam upaya pengembangan ketahanan pangan melalui pengembangan agribisnis tahun 2004.

4.2.2 Partisipasi dalam Jaringan sosial

Jaringan sosial yang terdapat di Subak Kerdung terbentuk berdasarkan kepentingan atau keterikatan individu yang sama, yaitu kebutuhan terhadap air irigasi, keberlanjutan usahatani, dan peningkatan kesejahteraan. Jaringan dalam subak ini meliputi antar anggota subak dalam kelompok, antara anggota subak dengan anggota subak di luar kelompok dalam subak, antara anggota subak dengan pengurus subak, maupun dengan pihak luar subak seperti penyuluh, pengusaha penggilingan gabah, pemilik traktor, lembaga pemasaran (saprodi dan hasil pertanian), lembaga keuangan (LPD, Bank, dan sebagainya) serta instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa subak memiliki jaringan yang luas dan terbuka.

Partisipasi dalam jaringan sosial di subak ini juga terkait erat dengan norma dan nilai yang diusung oleh Subak Kerdung. Berdasarkan hasil pengamatan, partisipasi dalam jaringan sosial di subak ini relatif tinggi, antara lain dilihat dari:

- a. Walaupun anggota tidak diwajibkan membayar iuran subak, tetapi anggota subak bersedia menyumbang dana/material untuk perbaikan saluran irigasi maupun pura secara sukarela.
- b. Tingkat kehadiran dalam gotong royong kegiatan subak sangat tinggi (rata-rata 92%) dan berdasarkan atas kesadaran anggota. Sistem gotong royong di subak ini sebagian besar dalam kegiatan pencarian air, distribusi air, perbaikan saluran irigasi, pembersihan sampah yang mengganggu kelancaran air irigasi, dan perbaikan pura subak, yang dipimpin oleh *kelian subak (pekaseh)* atau *kelian munduk* sesuai dengan tanggungjawabnya.

Gotong royong berarti bekerjasama atau memikul beban secara bersama sebagai bagian dari pemberdayaan diri secara kolektif untuk menyelesaikan suatu persoalan dan mencapai tujuan yang bersifat baik. Mengikuti pendapat Pranaji (2009), gotong royong dapat disebut sebagai inti "kekuatan budaya" masyarakat adat dan dijadikan landasan semangat dan tindakan kolektif untuk merevitalisasi adat istiadat bangsa. Esensi gotong royong terkandung makna kesetaraan, keadilan dan kebersamaan dalam memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Gotong royong dalam kegiatan subak ini, pada intinya adalah untuk memelihara saluran air irigasi agar terjamin ketersediaan air irigasi untuk keberlangsungan usahatani. Kegiatan gotong royong yang dilakukan di subak cukup intensif.

4.2.3 Reciprocity

Reciprocity atau saling tukar atau resiprositas dalam hal ini adalah saling tukar kebaikan atau saling memberi dan menerima kebaikan. Saling tukar kebaikan juga mengandung arti *altruism*, yaitu semangat mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Seperti halnya *trust* maka implementasi resiprositas juga berkaitan erat dengan norma dan nilai yang diusung dalam subak.

Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan secara gotong royong oleh semua anggota subak. *Kelian subak* bersama-sama dengan seluruh anggota bertanggung jawab terhadap fungsi bendung, trowongan, saluran primer, sekunder, bangunan bagi pada saluran primer dan sekunder, sedangkan *kelian munduk* bersama-sama dengan petani yang berkepentingan bertanggung jawab terhadap fungsi saluran tersier. Dalam pelaksanaannya, *pekaseh* membagi anggota secara bergantian dalam gotong royong, yaitu disesuaikan dengan giliran mendapatkan air. Hal ini membuktikan tingginya rasa tanggungjawab sosial anggota maupun pengurus subak. Jika ada anggota yang tidak hadir dalam gotong royong, *pekaseh* maupun ketua kelompok menasehati dan mengajak untuk berpartisipasi serta meminta ke-sadaran yang bersangkutan. Di samping itu, *pekaseh* belum pernah menerapkan sanksi yang telah dibuat bersama. Artinya, walaupun ada anggota yang kurang berpartisipasi, hingga saat ini belum dikenakan sanksi dan tetap diberikan air sebagai haknya walaupun tidak menjalankan kewajibannya.

Resiprositas dilaksanakan juga dalam kegiatan pena-naman, yaitu petani melakukannya dengan sistem ker-jasama secara tolong menolong bersama keluarga atau kerabatnya. Apabila ada wilayah yang memerlukan air tetapi belum waktunya memperoleh air maka wilayah tersebut dapat meminjam air melalui *pekaseh*, kemudian *pekaseh* menginformasikan kepada anggota bahwa ada kelompok yang meminjam air karena sangat membutuhkan. Hal ini membuktikan tingginya rasa empati antar anggota subak maupun pengurus serta adanya keterbukaan dalam manajemen subak. Ketersediaan air dalam pertanian khususnya pada usahatani padi merupakan syarat utama berlangsungnya usahatani padi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa resiprositas di subak ini berupa saling menolong khususnya saling meminjam air merupakan kekuatan sosial yang harus dipelihara untuk mewujudkan pembangunan pertanian.

4.2.4 Norma Sosial

Subak memiliki norma-norma yang diatur dalam *awig-awig* yang disusun dan disepakati bersama-sama oleh pengurus dan anggota subak, sehingga anggota maupun pengurus mempunyai pedoman yang jelas dalam berperilaku. Norma dalam *awig-awig* berisi aturan-aturan dan sangsi-sangsi terhadap pelanggaran aturan. Norma-norma yang telah disepakati antara lain : (i) keadilan dalam pendistribusian air. Setiap anggota subak memiliki "one inlet" dan "one outlet"nya masing-masing; dan (ii) sikap gotong royong dan saling menolong. Sikap ini dilakukan hampir pada setiap kegiatan subak oleh anggota maupun pengurus. Sikap gotong royong dan saling menolong juga dilakukan dalam mengatasi per-masalahan yang ada, misalnya menghalau ternak yang merusak tanaman sampai ke pemiliknya walaupun pada malan hari. Hal ini menunjukkan adanya kebersamaan antar anggota maupun antara anggota dengan pengurus.

4.2.5 Nilai Sosial

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nilai-nilai dalam subak merupakan implementasi fal-safah subak yaitu *Tri Hita Karana* (unsur *parhyangan*, unsur *pawongan*, dan unsur *palemahan*). Nilai-nilai yang terkait dengan unsur *parhyangan* antara lain rasa bersyukur. Rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Mahaesa diwujudkan dengan kegiatan ritual yang tidak terpisahkan dengan manajemen irigasi. Artinya, kegiatan ritual dilaksanakan sejak mencari air irigasi mengolah tanah hingga sebelum dan setelah melakukan panen padi. Kegiatan ritual ada yang dilakukan secara massal di pura subak dan ada pula dilakukan secara individu di pura yang terletak di sawah pribadi. Petani melaksanakan upacara ini dengan tujuan memohon untuk keberhasilan usahataninya dan bersyukur atas keberhasilan yang dicapai. Rasa bersyukur ini membuktikan adanya keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa.

Nilai-nilai yang terkait dengan unsur *pawongan* antara lain:

- a. Rasa malu telah membudaya di kalangan anggota. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan subak yang relatif tinggi. Anggota minta ijin kepada pengurus subak jika berhalangan hadir dalam kegiatan gotong royong, tetapi ada pula yang tidak ijin. Jumlah ketidak hadirannya relatif kecil, yaitu satu hingga tiga orang dalam setiap kelompok yang anggotanya 20-70 orang. Anggota siap menerima sangsi jika melanggar aturan (*awig-awig*) yang telah disepakati bersama, tetapi hingga saat ini belum ada yang dikenakan sangsi. Gotong royong dilakukan atas kesadaran, sukarela, kebersamaan, kekeluargaan, dan keikhlasan. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan dalam kegiatan gotong royong cenderung dilakukan oleh individu yang sama maka sebaiknya sangsi sebagai proses perubahan perilaku diterapkan sesuai ketetapan.
- b. Kejujuran. Kejujuran anggota subak diwujudkan antara lain melalui pengambilan air irigasi sesuai dengan aturan, yaitu menggunakan sistem "one inlet dan one outlet".
- c. Sabar. Khususnya pada musim kemarau debit air irigasi menurun. Anggota subak yang memiliki lokasisawah di hilir dengan sabar menunggu giliran air dari sawah yang berada di atasnya. Jika tidak memungkinkan menanam padi di wilayah hilir maka pekaheh menganjurkan menanam palawija yang tidak banyak membutuhkan air. Rasa malu, kejujuran, dan sabar membuktikan adanya keharmonisan antara manusia dengan manusia lainnya.

Nilai-nilai yang terkait dengan unsur *palemahan* antara lain disiplin dan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian alam. Hal ini diwujudkan dengan gotong royong memelihara bendungan dan saluran irigasi; tidak menebang pohon sembarangan. Dalam pemberantasan hama pun petani tidak langsung membunuhnya, melainkan meminta ijin terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Mahaesa dengan melakukan ritual "*Nangluk Merana*". Disiplin dan tanggungjawab anggota ini membuktikan adanya keharmonisan antara manusia dengan alam.

Proses harmoni dan kebersamaan sebagai implementasi falsafah utama Subak Kerdung, yaitu *Tri Hita Karana* telah mewujudkan Subak Kerdung menjadi modal sosial yang kuat.

4.3 Modal Sosial Subak sebagai Energi Sosial dalam Pembangunan Pertanian di Perkotaan

Modal sosial Subak Kerdung berupa *trust* yang tinggi dalam bentuk pengambilan keputusan yang adil; ja-ringan sosial yang luas; partisipasi yang tinggi dalam bentuk gotong royong dalam menjaga kelestarian alam; resiprositas yang kuat dalam mencukupi kebutuhan air irigasi; norma yang berfungsi sebagai pedoman anggota dan pengurus subak berperilaku; serta nilai-nilai seperti rasa bersyukur, rasa malu, kejujuran, sabar, disiplin, dan tanggungjawab yang tinggi.

Sebagaimana pendapat Woolcok (1998), *trust* sebagai rasa saling mempercayai antar individu dan antar kelompok di dalam suatu masyarakat (atau bangsa) dibangun oleh norma-norma dan nilai-

nilai luhur yang melekat pada budaya masyarakat (atau bangsa) tersebut. Demikian pula, Putnam (1993) berpendapat bahwa berbagai tindakan kolektif yang didasari rasa saling mempercayai yang tinggi (*high trust*), akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun bersama. *Trust* atau kepercayaan yang bersifat timbal-balik antara seluruh komponen stakeholders menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan stakeholders dalam pembangunan.

Woolcok (1998) meyakini bahwa *trust* merupakan sumber energi kolektif suatu masyarakat (atau bangsa) untuk membangun institusi-institusi di dalamnya guna mencapai kemajuan dan mempengaruhi semangat dan kemampuan berkompetisi secara sehat di tengah masyarakat (atau bangsa). Pendapat yang sama dari Fukuyama (2000), yaitu modal sosial merupakan energi kolektif masyarakat (atau bangsa) guna mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan ekonomi.

Tingkat partisipasi petani dalam gotong royong, luasnya jaringan sosial, dan resiprositas petani dalam jaringan subak dipengaruhi oleh tingkat *trust* yang dimiliki subak. Semakin tinggi partisipasi petani dalam gotong royong, semakin luas jaringan social, dan semakin kuat resiprositas petani dalam jaringan subak akibat tingginya *trust* yang dimiliki subak ini maka akan memberi jaminan ketersediaan air irigasi untuk memenuhi kebutuhan usahatani dan memberi semangat kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Melalui *trust* yang tinggi maka konflik-konflik antara anggota dalam kelompok atau dengan kelompok lainnya bisa diminimalkan; petani tidak perlu membuang waktu banyak untuk mencari air (lebih efisien dalam penggunaan waktu); petani dapat menambah pengetahuan dan menerapkan inovasi yang terbukti secara teknis dapat dilakukan, secara ekonomis menguntungkan, dan secara sosial dapat diterima atau sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di wilayah petani. Artinya, *trust* atau rasa saling mempercayai yang tinggi dalam modal social subak dapat meningkatkan semangat petani untuk berproduksi lebih efisien dan efektif. Seperti diungkapkan oleh Mosher (1965) bahwa untuk memodernisasi pertanian agar terjadi pembangunan pertanian maka salah satu syarat yang harus ada yaitu rangsangan berproduksi. Mengikuti pemikiran Kartasasmita (1997), jika elemen-elemen dalam modal sosial subak ini dihimpun, dikonsolidasikan, didayagunakan akan menghasilkan energi sosial yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan termasuk pembangunan pertanian.

Uphoff (1986) berpendapat bahwa energi sosial itu dapat merupakan kekuatan konstruktif atau destruktif, dan karenanya amat tergantung pada sistem sosial yang mengaturnya. Dalam sistem sosial yang berdaya inovasi tinggi, energi sosial bisa diolah dengan baik sehingga dapat menjadi kekuatan dinamis yang mampu menggerakkan pembangunan. Jika energi sosial tidak dikelola dengan baik, bisa berakibat merugikan. Oleh karena itu, *pekaseh* dan pengurus subak harus melakukan tindakan-tindakan proaktif dengan memanfaatkan energi sosial yang dimiliki Subak Kerdung, baik melalui interaksi sosial yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Interaksi sosial bersifat horizontal dikembangkan untuk meningkatkan keharmonisan dan kebersamaan antar anggota subak, antara anggota dengan pengurus subak, serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait (lembaga pemerintah, LSM, lembaga pendidikan tinggi, lembaga keuangan, perusahaan swasta dan sebagainya). Sedangkan interaksi vertikal dikembangkan antara anggota dan pengurus subak dengan pemerintah.

Pemanfaatan energi sosial dalam modal sosial subak diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya petani dan semangat petani untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian, yaitu kesejahteraan petani. Di samping itu, hendaknya pemerintah sebagai perencana program-program pembangunan pertanian dapat memposisikan subak sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan dan memfungsikan subak beserta pranata sosialnya untuk menjembatani berbagai kepentingan anggota dalam mewujudkan pembangunan pertanian.

Berdasarkan pengembangan pemikiran Fukuyama (1995), Gambetta (2000) menyatakan bahwa rasa saling percaya mempercayai (*trust*) menentukan kemampuan suatu bangsa untuk membangun masyarakat dan institusi-institusi di dalamnya guna mencapai kemajuan. Namun, *trust* tidak akan memadai tanpa diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi, yang memberikan peluang bagi stakeholders untuk mengawasi atau memverifikasi tindakan atau keputusan yang dibuat pemerintah. Oleh karena itu, pengurus sebaiknya menyampaikan kepada anggota segala permasalahan-permasalahan dan capaian dalam rapat rutin, terlebih lagi adalah pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel karena masalah keuangan biasanya sangat pelik dalam suatu organisasi.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Proses harmoni dan kebersamaan sebagai implementasi falsafah utama Subak Kerdung, yaitu *Tri Hita Karana* telah mewujudkan Subak Kerdung menjadi modal sosial yang kuat. Modal sosial Subak Kerdung berupa *trust* yang tinggi dalam bentuk pengambilan keputusan yang adil; jaringan sosial yang luas; partisipasi yang tinggi dalam bentuk gotong royong dalam menjaga kelestarian alam; resiprositas yang kuat dalam mencukupi kebutuhan air irigasi; norma yang berfungsi sebagai pedoman anggota dan pengurus subak berperilaku; serta nilai-nilai seperti rasa bersyukur, rasa malu, kejujuran, sabar, disiplin, dan tanggungjawab yang tinggi.

Elemen-elemen modal Subak Kerdung tersebut jika dihimpun, dikonsolidasikan, dan didayagunakan akan menghasilkan energi sosial yang bisa dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan termasuk pembangunan pertanian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa modal sosial subak merupakan energi sosial dalam pembangunan pertanian.

5.2 Saran

Untuk mewujudkan modal sosial subak sebagai energi sosial dalam pembangunan pertanian maka beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah (1) memfungsikan subak untuk menjembatani berbagai kepentingan anggota dalam pembangunan pertanian, (2) memposisikan subak sebagai subjek bukan sebagai objek pembangunan, (3) pengurus subak perlu lebih proaktif, (4) manajemen subak lebih transparan dan akuntabel, (5) menerapkan aturan yang telah disepakati, dan (6) melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait (lembaga pemerintah, LSM, lembaga pendidikan tinggi, lembaga keuangan, perusahaan swasta dan sebagainya) termasuk komunitas di sekitarnya perlu dijalin dalam membentuk jaringan kerjasama yang baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1985). *The Forms of Capital*, dalam John G. Richardson. 1986. *Handbook of Theory and Research for The sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Coleman, J.S. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard. University Press.
- Cox, E. 1995. *A Truly Civil Society*. ABC Books. Sidney.
- Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2002. Tuntunan Pembinaan dan Penilaian Subak. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: Free Press.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital and Civil Society*. International Monetary Fund Working Paper, WP/00/74,1-8.
- InElinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Fondation of Social Capital*. Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited.
- Gambetta, D. 2000. *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. Electrominc Edition. Chapter 13. Oxford: Departement Sociology, University of Oxford, 213-37. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Fondation of Social Capital*. Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited.
- Hasbullah, J., 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Jakarta: MR-United Press.
- Ibrahim, L. D. 2006. Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi. Dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG. Vol. 1 No. 2.
- Kartasasmita, G. 1997. Membangun Sumberdaya Sosial Profesional. Makalah Disampaikan pada Kongres ke VII HIPIIS, Medan, 21 Maret 1997. www.ginandjar.com.
- Margono, S. 2000. "Memantapkan Posisi dan meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan". Dalam Proseding Seminar IPB Bogor: *Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani*. Pustaka Wira Usaha Muda.
- Mariana, D. 2006. Modal Sosial (*Social Capital*) dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Laporan Utama Media Komunikasi Triwulan Warta Bapeda Oktober-Desember
- Mawardi, J.M. 2007. Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Komunitas. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Volume 3, Nomor 2, Juni 2007.
- Mosher, A. T. 1991. Menggerakkan dan Membangun Pertanian: Syarat-Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi. Cet ke-13. Krisnandhi dan Bahrin Samad Editor. Diterjemahkan dari: *Getting Agricultural Moving*. CV. Yasaguna, Jakarta.
- Pitana, 1993. Subak. Sistem Irigasi Tradisional Bali. Sebuah Canangsari. Penerbit Upada Sastra, Denpasar.
- Pitana dan Setiawan. 2005. Revitalisasi Subak Dalam Memasuki Era Globalisasi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pranaji, T., 2009. Penguatan Kelembagaan Gotong Royong Dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Volume 27 No.1, Juli 2009: 61-72.
- Putnam, R.D. 1993. *Making Democracy Work: Civil Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sarimarito, E. 2007. Interaksi Sosial Petani Subak Kerdung Keurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar.
- Sutawan. 2008. Organisasi Dan Manajemen Subak di Bali. PT Offset BaliPost, Denpasar.

- Uphoff, N. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook, with Cases*. Kumarian Press, Ewst Hartford, CN.
- Windia, W dan R.K. Dewi, 2007. *Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana*. Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Woolcok, M. 1998. *Social Capital and Economic Development: Toward Theoretical, Synthesis and Policy Framework*. *Theory and Society*, 27 (1), 151-208. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Fondation of Social Capital*. Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited.